

**ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KOTA SEMARANG**

Sinta Syafril, Dra. Susi Sulandari, M.Si

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana banjir. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang sering terkena bencana banjir dan mendapatkan urutan ketiga di Provinsi Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana yang terjadi di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta faktor pendorong dan penghambat kinerja dalam penanggulangan bencana banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pada penelitian ini adalah produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu juga dilihat dari faktor pendorong dan penghambat kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dalam penanggulangan bencana banjir belum maksimal, karena masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target di setiap tahapan bencana. Kualitas layanan dalam penanggulangan bencana banjir juga belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, responsibilitas yang dilakukan belum maksimal, karena masih terdapat kendala, dan belum akuntabel dan transparansi kepada masyarakat. Faktor yang menghambat kinerja adalah kurangnya SDM yang handal dan terampil dibidangnya, kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, kurangnya koordinasi dengan berbagai *stakeholders*, sedangkan kepemimpinan, dan tim menjadi pendorong. Rekomendasi peneliti adalah dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai melalui pelatihan, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* serta menyesuaikan prioritas program penanggulangan bencana banjir dengan pagu anggaran.

Kata Kunci: Kinerja, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Akuntabilitas

**PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL DISASTER
MANAGEMENT AGENCY (BPBD) IN FLOOD DISASTER
MANAGEMENT IN SEMARANG CITY**

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries prone to floods. The city of Semarang is one of the cities frequently affected by floods and gets third place in Central Java Province. The Semarang City Disaster Management Agency (BPBD) is the body responsible for handling disasters that occur in the city of Semarang. The purpose of this study was to analyze and describe the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) as well as the driving and inhibiting factors in flood management. The research method used is descriptive qualitative method. The indicators used to assess the performance in this study were productivity, service quality, responsibility, and accountability. In addition, it is also seen from the driving factors and inhibitors the organizational performance. The results of the study showed that the productivity of the performance in flood management has not been optimal, because there were still programs or activities that have not reached the target. The service quality in flood management has not been maximized and needs to be improved, the responsibility carried out is quite good but there are still obstacles, and not yet accountable and transparency to the community. Factors that hinder performance were lack of reliable and skilled human resources in their field, lack of facilities and infrastructure, limited funds, lack of coordination with various stakeholders, while leadership, and team were the drivers. The recommendation of researchers was to improve the skills and abilities of employees through training, improve facilities and infrastructure, improve coordination with various stakeholders and adjust the priorities of flood disaster management programs with a budget ceiling.

Keywords: Performance, Productivity, Service Quality, Responsibility, Accountability

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam salah satunya adalah Indonesia Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada pertemuan antar lempeng tektonik dan daerah

tropis yang memiliki dua musim yaitu hujan dan panas. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung berapi, dan bencana lainnya. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2017 sudah

terjadi sebanyak 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Adapun, jumlah kejadian bencana banjir sebanyak 737 kejadian, puting beliung sebanyak 651 kejadian, tanah longsor sebanyak 577 kejadian, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 96 kejadian, banjir dan tanah longsor sebanyak 67 kejadian, kekeringan sebanyak 19 kejadian, gempa bumi sebanyak 18 kejadian, gelombang pasang/abrasi sebanyak 8 kejadian, dan letusan gunung api sebanyak 2 kejadian. ¹Berdasarkan data tersebut maka bencana yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah banjir sebanyak 737 kejadian.

Salah satu Provinsi yang rawan bencana di Indonesia adalah Jawa Tengah. Bencana alam di Jawa Tengah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,19% (dikutip dari BPBD Provinsi Jawa Tengah). Hal ini membuktikan bahwa Jawa Tengah rawan terhadap bencana. Kota Semarang merupakan kota

¹ (dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/17200331/sepanjang-2017-bnpb-mencatat-2175-kejadian-bencana-di-indonesia>).

ketiga yang rawan dengan bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan indeks resiko bencana yang tinggi dan data kejadian bencana banjir tahun 2014-2017. Bencana banjir merupakan bencana yang menjadi langganan masyarakat Kota Semarang setiap tahunnya yang menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat diantaranya dampak fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu penanggulangan bencana yang menjadi prioritas pemerintah Kota Semarang adalah penanggulangan bencana banjir hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, Minggu 11 Februari 2018 bahwa penanggulangan bencana banjir sudah masuk menjadi salah satu prioritas dari program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. ²

BPBD Kota Semarang bertanggung jawab atas kebencanaan yang terjadi di Kota Semarang mulai

² (dikutip dari <https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/23656/dewan-penanggulangan-banjir-wajib-dipercepat>).

dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.

Kinerja BPBD kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir masih belum optimal dilakukan karena masih terdapat kendala diantaranya masih terdapat SDM yang tidak berkompeten, kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada kelurahan siaga bencana, dan tidak adanya SOP yang jelas tentang penanggulangan bencana banjir.

Masalah sarana dan prasarana penunjang perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja dari BPBD Kota Semarang. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir belum optimal dilakukan. Selain itu BPBD Kota Semarang kekurangan orang yang kompeten di bidangnya hal ini dikarenakan BPBD memberikan

pelayanan 24 jam non stop kepada masyarakat, sedangkan pegawai yang jaga dibagi per shift menjadi 8 orang hal ini membuat pelayanan yang diberikan kurang efisien, kurang efektif, dan kurang cepat tanggap. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh BPBD Kota Semarang.

Capaian kinerja BPBD Kota Semarang dapat kita lihat pada kegiatan atau program BPBD yang tidak mencapai target disetiap tahapan bencana yaitu pada tahap tanggap darurat yaitu menyelenggarakan pengadaan logistic dan obat-obatan bagi penduduk di penampungan sementara, dimana 2013 hanya tercapai 99,04%, ditahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 99,40%, di tahun 2015 mengalami menurun ke 99,22%, di tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 98,95, ditahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 98,37% jauh dari target 100% yang ingin di capai oleh BPBD, hal ini disebabkan oleh lebih banyak kebutuhan masyarakat daripada

ketersediaan logistik yang ada, selain itu karena dana yang dimiliki oleh BPBD yang minim. (Diolah dari Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang per 31 Desember 2017). Hal ini membuktikan bahwa kinerja BPBD dalam penanggulangan banjir belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kendala dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan masih tingginya bencana banjir di tahun 2017 yaitu 20 kejadian banjir.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja BPBD Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?

C. Kajian Teori

A. Administrasi Publik

Sebagai disiplin ilmu Administrasi Publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui peningkatan dalam berbagai bidang diantaranya bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu tentu mengalami pergeseran paradigma. Nigro & Nigro dalam Keban (2014:5) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik, yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta. Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu yang di dalamnya

termuat bagaimana sumberdaya dan personel publik dapat terkoordinasi dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

B. Manajemen Publik

Overman dalam Keban (2014:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “*rational-instrumental*” pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

C. Konsep Organisasi

Menurut Gerlof (dalam Kusdi 2013:4) karakteristik organisasi terdiri dari *purpose*, *people*, dan

plan. Sesuatu tidak dapat disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan (*purpose*), anggota (*people*), dan rencana (*plan*). Dalam aspek rencana terkandung semua ciri lainnya seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

D. Konsep Kinerja

A. Pengertian Kinerja

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu kinerja juga diartikan sebagai prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

1. Kinerja Organisasi

Menurut M. Mahsun (2006) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

2. Indikator Kinerja

Menurut Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

- a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- c. Responsitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- d. Responsibilitas, menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholder.

Menurut Mahsun (2006:196) indikator input terdiri dari jumlah dana, jumlah pegawai, jumlah infrastruktur, dan jumlah waktu, sedangkan indikator output terdiri dari bentuk fisik dan jasa yang dihasilkan.

Menurut Hardiansyah (2011:46) yang mengutip dari

Zeithaml, Parasuraman & Berry indikator kualitas layanan terdiri dari:

- 1). *Tangibles* (bukti fisik), terdiri dari fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, perlengkapan yang dipergunakan (teknologi),serta penampilan pegawai.
- 2). *Reliability* (kehandalan), merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya terutama memberikan jasa secara tepat waktu.
- 3). *Assurance* (jaminan), merupakan pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan pegawai dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.
- 4). *Empty* (empati), memberikan perhatian secara individual atau pribadi kepada para pelanggan dengan berupaya memahami konsumen.
- 5). *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, kesigapan karyawan,

kecepatan karyawan dalam memberikan pelayanan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, penanganan keluhan konsumen dan sebagainya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Organisasi

Menurut Mahmudi (2013:20) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individual meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
- c. Faktor tim meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor sistem meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.

- e. Faktor kontekstual (situasional) meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Harbani (2011:179) faktor yang mempengaruhi terdiri kemampuan, kemauan, energi, teknologi, kompensasi, dan kejelasan tujuan.

Peneliti juga melihat kinerja dari tahapan bencana terdiri dari pra bencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPBD Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, tipe penelitian ini deskriptif yang menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan penelitian adalah pegawai BPBD Kota Semarang dan masyarakat yang terkena bencana banjir. Teknik untuk menguji kualitas data adalah triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang

A. Produktivitas

Produktivitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan kinerja organisasi, karena produktivitas akan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik yang diberikan kepada organisasi. Selain itu produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, hal ini disampaikan dalam Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto.

Hasil yang peneliti peroleh bahwa produktivitas kinerja BPBD disetiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir

belum maksimal dilakukan, karena peneliti masih menemukan beberapa program atau kegiatan yang belum mencapai target dan sasaran yang diinginkan seperti pada pra bencana pembentukan KSB yang ditargetkan 58 baru kebentuk 35, pembentukan Katana yang ditargetkan 25 baru kebentuk 11. Pada tanggap darurat kekurangan pengadaan logistik, dan pasca bencana belum maksimal dalam pelatihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini disebabkan masih terdapat kendala dalam merealisasikan kegiatan atau program yang ada diantaranya kekurangan dana, kekurangan sdm yang handal dan terampil di bidangnya, kekurangan sarana dan prasarana, dan masih terdapat miskomunikasi dengan dinas lain. Namun BPBD Kota Semarang berupaya meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana banjir dimulai dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, selain itu meningkatkan kapasitas sdm melalui pelatihan dan *study banding* ke BPBD lainnya.

Produktivitas didukung oleh faktor kepemimpinan dan tim.

B. Kualitas Layanan

Menurut Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto kualitas layanan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kualitas layanan BPBD di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir belum maksimal dilakukan, dilihat dari bentuk fisik dalam penanggulangan bencana banjir seperti penyediaan logistik dan jalur evakuasi, kehandalan BPBD dan intansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir, kemampuan BPBD merespon dan memahami kebutuhan masyarakat, jaminan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir, serta sikap empati yang ditunjukkan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir dengan menyediakan psikolog untuk menghilangkan trauma biasanya dari Unika, Undip, dan Dinas Sosial. Kualitas layanan BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir didukung oleh motivasi dan arahan pemimpin, dan dukungan antar pegawai. Namun BPBD masih

memiliki kendala dalam memberikan kualitas layanan diantaranya masih minimnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh personil BPBD Kota Semarang, kekurangan sarana dan prasarana, terkendala oleh jarak tempuh atau waktu tempuh ke tempat kejadian, kekurangan dana untuk mendukung program atau kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana banjir.

c. Responsibilitas

Menurut Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto responsibilitas menjelaskan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Responsibilitas BPBD disetiap tahapan bencana belum maksimal dilakukan karena masih terdapat kendala diantaranya masih terdapat miskomunikasi dengan berbagai dinas terkait seperti BBWS dalam pemasangan EWS, kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh

BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan BPBD atas kegiatan atau program yang dilakukan ke masyarakat. Akuntabilitas yang dilakukan BPBD disetiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik didukung oleh arahan, motivasi dan dukungan sesama pegawai dalam bekerja. Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BPBD dapat dilihat dari LAKIP, LKPI, website, instagram, dan facebook. BPBD Kota Semarang bertanggung jawab melaporkan semua kegiatannya kepada Wali Kota. Namun masih terdapat kendala dalam mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparansi diantaranya masih terdapat miskomunikasi dengan dinas terkait dalam hal penggunaan website, serta belum transparansi dalam penggunaan anggaran, dan masih rendah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang

1. Faktor Pendorong

a. Faktor Kepemimpinan

Pemimpin di BPBD sudah memberi motivasi kepada bawahan disetiap tahapan bencana agar bekerja dengan baik seperti pemberian *reward* dan kenaikan pangkat yang diberikan saat apel atau rapat koordinasi, serta arahan yang diberikan pemimpin juga membuat pegawai paham atas tupoksi yang harus dilakukannya, serta melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir dan mendengarkan semua saran dan kritik bawahan.

b. Faktor tim

Faktor tim di BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi, bentuk dukungan, dan kerja sama yang dilakukan antar pegawai disetiap tahapan bencana dimana saling mendukung satu dengan yang lainnya. Biasanya didukung oleh rapat koordinasi antar bidang.

Faktor Penghambat

a. Faktor Personal

Faktor personal berkaitan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kinerja suatu organisasi. Berdasarkan penelitian kualitas sumber daya manusia dari keterampilan dan komitmen dalam penanggulangan bencana banjir di BPBD Kota Semarang di setiap tahapan bencana belum maksimal dilakukan, dimana keterampilan dan komitmen dari petugas perlu ditingkatkan lagi agar bisa mendukung kinerja ke arah yang lebih baik.

b. Faktor Sistem

Mekanisme sistem kerja di BPBD belum maksimal dilakukan karena belum ada sop dalam penanggulangan bencana banjir di setiap bidangnya. Selain itu sarana dan dalam penanggulangan bencana banjir masih kurang sehingga menghambat kinerja BPBD, serta perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir.

c. Teknologi

Pengaruh perkembangan teknologi dalam penanggulangan bencana

banjir sangat besar, namun BPBD Kota Semarang masih minim pegawai yang mampu mengoperasikan teknologi yang ada.

d. Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan atau program di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir.

e. Kurangnya Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Koordinasi BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir masih minim, hal ini dapat dilihat dari pemasangan EWS.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang di setiap tahapan bencana belum maksimal dapat dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas. Pada aspek produktivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir masih terdapat program atau kegiatan yang tidak mencapai target di setiap tahapan bencana yang

diinginkan, seperti KSB, KATANA.

Selain itu terdapat kendala dalam merealisasikan kegiatan atau program yang ada diantaranya kekurangan dana, kekurangan sdm terampil di bidangnya, kekurangan sarana dan prasarana, dan masih terdapat miskomunikasi dengan dinas lain. Pada aspek kualitas layanan BPBD juga belum maksimal, karena masih terdapat keluhan dari masyarakat, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Pada aspek responsibilitas dalam penanggulangan bencana banjir juga belum maksimal karena masih terdapat kendala diantaranya masih terdapat miskomunikasi dengan berbagai dinas terkait, masing kurang pemahaman dari masing-masing pihak seperti dinas-dinas, dunia usaha, dan masyarakat, kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Pada aspek akuntabilitas BPBD Kota Semarang belum mampu bersifat akuntabel dan transparansi kepada masyarakat karena tidak semua

informasi di sebarluaskan kepada masyarakat. Faktor pendorong adalah kepemimpinan, dan tim. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor personal yaitu kurang sdm yang berkompeten, faktor sistem yaitu belum maksimalnya mekanisme sistem kerja karena tidak memiliki sop kebencanaan di setiap bidangnya, serta kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir.

b. Saran

1. Untuk meningkatkan produktivitas BPBD Kota Semarang di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir, maka perlu meningkatkan pencapaian program atau kegiatan yang belum mencapai target. Peningkatan ini dilakukan dengan memaksimalkan ke program atau kegiatan yang belum tercapai di setiap tahapannya seperti memaksimalkan kegiatan pra bencana contoh KSB, KATANA, SMAB, pada tanggap darurat dengan memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait

dalam pengadaan logistik, serta pasca bencana dengan memaksimalkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk meningkatkan produktivitas BPBD juga melakukan pelatihan dan *study* banding ke BPBD lain agar dapat menambah keterampilan yang dimiliki dari berbagai bidang kebencanaan seperti pelatihan *rescue*, pelatihan renang, penggunaan teknologi kebencanaan seperti EWS, dan pendirian tenda. Selain itu BPBD juga menyesuaikan prioritas kegiatan atau program di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir dengan anggaran yang dimiliki, serta memaksimalkan koordinasi dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

2. Untuk meningkatkan kualitas layanan BPBD Kota Semarang di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir, maka perlu mempertahankan pelayanan yang diberikan serta meningkatkan bukti fisik dalam pelayanan, kehandalan,

pengetahuan, kemampuan, dan empati semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir yaitu, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan maka perlu meningkatkan penerapan komitmen petugas dalam penanggulangan bencana banjir, serta perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung di setiap tahapan bencana terutama tahapan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana banjir seperti HT, perahu karet, tenda pengungsi, sepatu boots, jas hujan, dapur umum, dan lainnya.

3. Untuk meningkatkan tanggung jawab dan tanggung jawab BPBD Kota Semarang di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir, maka perlu meningkatkan pemahaman semua pihak dalam penanggulangan bencana banjir, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama BPBD dengan *stakeholders* lain, dan membuat standar operasional prosedur masing-masing bidang agar pelaksanaan penanggulangan

bencana banjir lebih terprosedur dan mampu menerapkan manajemen bencana dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kinerja BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir. BPBD Kota Semarang.

4. Untuk meningkatkan akuntabilitas BPBD Kota Semarang di setiap tahapan bencana dalam penanggulangan bencana banjir, maka perlu pembaharuan setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaporkan di website, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BPBD, karena dapat meningkatkan kinerja BPBD Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gaya Media
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusdi. 2013. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2014. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Refika Aditama. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/17200331/sepanjang-2017-bnpb-mencatat-2175-kejadian-bencana-di-indonesia> Diakses pada tanggal 10 September 2018 pada pukul 19.00 WIB.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. [https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/23656/dewanpenanggulangan-banjir-wajib dipercepat](https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/23656/dewanpenanggulangan-banjir-wajib-dipercepat). Diakses pada tanggal 10 September 2018 pada pukul 19.15.WIB
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : FE UGM.
- Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: *Book Terrace dan Library*.
- Pasalong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (Lakip) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2013-2017

BPBD Provinsi Jawa Tengah

Internet